

Model Manajemen Konflik Berbasis Sekolah dalam Layanan BK Komprehensif Untuk Anak Berhadapan Hukum (ABH): Pengembangan dan Validasi di Kota Pontianak

Tri Mega Ralasari S¹, Syarif Firmansyah²

Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, Universitas PGRI Pontianak, Indonesia¹

Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, Universitas PGRI Pontianak, Indonesia²

E-mail: mega88.mt@gmail.com¹, anti.alidrus@gmail.com²

Correspondent Author: Tri Mega Ralasari S, mega88.mt@gmail.com

Doi: [10.31316/g-couns.v9i3.7828](https://doi.org/10.31316/g-couns.v9i3.7828)

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada pengembangan model manajemen konflik berbasis sekolah dalam BK komprehensif, untuk meningkatkan kesadaran social. Subyek penelitian ini adalah ABH yang ada di jenjang SMP Kota Pontianak dari rentang usia 13-15 tahun, baik laki-laki dan perempuan. Tujuan penelitian untuk memperoleh model hipotetik manajemen konflik berbasis sekolah dalam layanan BK komprehensif yang valid, praktis, dan efektif digunakan dalam layanan BK kepada ABH. Metode penelitian menggunakan model ADDIE. Dari hasil penelitian kemudian dideskripsikan bahwa: 1) MKBS dalam BK Komprehensif dikategorikan valid berdasar validator pakar kelimuan, bahasa, dan sejarah budaya di Kota Pontianak dengan kriteria validasi sebesar 87% untuk diterapkan; 2) MKBS dalam BK Komprehensif sesuai untuk diterapkan ke ABH untuk meningkatkan tingkat kesadaran sosial yang berada pada kategori rendah yakni sebesar 31.55%. Model ini diharapkan dapat diterapkan di SMP Kota Pontianak untuk dapat meningkatkan kesadaran sosial ABH.

Kata Kunci: manajemen konflik berbasis sekolah, anak berhadapan hukum, BK komprehensif

Abstract

This research focuses on the development of a school-based conflict management model in comprehensive BK to increase social awareness. The subject of this study is ABH, who is at the junior high school level in Pontianak City, aged 13-15 years, and includes both male and female students. The purpose of the study was to obtain a hypothetical model of school-based conflict management in comprehensive BK services that is valid, practical, and effective for use in BK services to ABH. The research method uses the ADDIE model. From the results of the study, it was then described that: 1) MKBS in the Comprehensive BK is categorized as valid based on expert validators of knowledge, language, and cultural history in Pontianak City with a validation criterion of 87% to be applied; 2) MKBS in Comprehensive BK is suitable to be applied to ABH to increase the level of social awareness which is in the low category, which is 31.55%. This model is expected to be applied in Pontianak City Junior High School to increase ABH's social awareness.

Keywords: school-based conflict management, children facing the law, comprehensive BK

Info Artikel

Diterima Mei 2025, disetujui Juli 2025, diterbitkan Agustus 2025



PENDAHULUAN

Pada media elektronik terdapat pemberitaan tentang tawuran remaja dengan menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan adanya korban jiwa (Harsono, 2024; KPAD, 2024; Pontianak Daily, 2025; KPAI, 2025; Kemendikdasmen, 2025), beberapa media pemberitaan lainnya seperti yang termuat pada Kompas.com dengan tajuk “Konvoi Sambil "Nenteng" Senjata Tajam, 6 Remaja di Pontianak di tangkap”, dan juga dalam artikel lainnya berjudul, “Viral Bocah Pontianak Pamer Sajam saat *Live Instagram*, Netizen: Pasti Mau Panen Sawit”. Mengacu pada data Anak Berhadapan Hukum (ABH) penyidik Sat Reskrim Polresta Pontianak Kota menyebutkan peningkatan kasus Anak Berhadapan dengan Hukum yang di tangani hingga Proses Pengadilan, pada tahun 2022 terdapat 9 Kasus ABH dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 21 kasus (Pontianak Daily, 2025). Dan pada triwulan pertama tahun 2024 Penyidik Polresta Pontianak telah menangani kasus anak berhadapan hukum (ABH) sebanyak 8 kasus.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa kenakalan anak/remaja usia sekolah yang memenuhi unsur tindak pidana setiap tahunnya meningkat dan terhadap aksi- aksi kenakalan remaja usia sekolah yang mengarah tindak pidana. KPAD Kota Pontianak, melaporkan ada delapan kasus yang terjadi di Pontianak yang tercatat di KPAD mulai dari 17 Januari sampai 18 Maret 2024 yang masih berlangsung hingga janurai 2025 dengan kasus yang serupa, di antaranya ada beberapa kasus anak yang membawa senjata tajam, balap liar dan razia di kos-kosan (Bobbio, 2020; Arbach, 2021; KPAD, 2024). Data ini sejalan dengan hasil penelitian terhadap analisis kesadaran hukum bagi kesadaran hukum bagi peserta didik terhadap pelanggaran disiplin di SMA Negeri 1 Bilah Hulu oleh Yosefina Mariama Pardosi, dan kawan-kawan menyebutkan bahwa aktor penyebab peserta didik melakukan pelanggaran disiplin dikarenakan faktor keluarga yang kurang menerapkan disiplin terhadap anak, faktor sekolah yang kurang kondusif dalam pengajaran, dan faktor dari pergaulan interaksi sosial teman yang kurang kondusif sehingga berdampak negatif bagi siswa (Bobbio, 2020; Pardosi, 2024).

Anak berhadapan hukum (ABH) membutuhkan sinergitas dan penyediaan sumber daya manusia yang profesional, sarana prasarana dan kelembagaan yang mendukung untuk memperoleh layanan, serta mekanisme yang menerapkan prinsip keadilan restoratif, dengan menempatkan kepentingan terbaik bagi anak dan fokus pada pencegahan sebagai tujuan utama, dan sanksi pidana sebagai alternatif akhir dan jika memungkinkan, pidana tersebut diberikan dalam waktu sesingkat-singkatnya, serta mengedepankan pelayanan rehabilitasi dan reintegrasi (Sukatin, 2022; Sodikin, 2023; Sigalingging, 2025). Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan ABH harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah R.I dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak Berhadapan dengan Hukum (Bobbio, 2020).

Realitanya, stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sering kali menjadi penghalang utama bagi upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial mereka. Dalam konteks ini, hukum memiliki peran strategis untuk melindungi anak-anak dari efek negatif stigmatisasi melalui pendekatan berbasis perlindungan anak (O'Connor, 2021; Kartika, 2025). Pada Jurnal ilmiah oleh Meliana Kartika, dan kawan-kawan mengeksplorasi pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan restoratif dan diversifikasi. Sejalan dengan upaya tersebut, dalam jurnal Pengabdian kepada masyarakat berjudul Penerapan Sanksi



Terhadap Siswa/Siswi yang melakukan pelanggaran di luar sekolah, oleh Kasmanto Rinaldi, diperoleh informasi kebanyakan siswa telah paham mengenai jenis-jenis pelanggaran di sekolah, tetapi banyak dari mereka belum menyetahui jenis pelanggaran diluar sekolah dan dampaknya bagi mereka, sehingga wajar banyak siswa masih cenderung terlibat dalam pelanggaran yang berakhir pada kenakalan remaja yang lebih parah (Rinaldi, 2022). Sinergitas dalam upaya peningkatan kepatuhan pelajar dapat mencakup pengembangan program pendidikan dan pencegahan untuk remaja, pembentukan komunitas sekolah yang inklusif, peningkatan pengawasan dan pengawasan di lingkungan sekolah, serta penerapan sanksi yang proporsional dan rehabilitatif bagi pelajar yang melanggar tata tertib (Usmita, 2023; Balamurgan, 2024).

Salah satu upaya yang dilakukan di Kota Pontianak, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat dan Dinas Pendidikan Kota Pontianak, telah menyurati sekolah-sekolah yang ada di Kalimantan Barat, utamanya Kota Pontianak untuk mengambil langkah konkret dalam mengatasi masalah kenakalan remaja. Surat tersebut berisi permintaan kepada para tenaga pengajar untuk meningkatkan pendidikan karakter siswa di sekolah guna mencegah terjadinya kekerasan di kalangan pelajar. Selain itu, dihimbau juga agar pihak sekolah melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada orang tua wali siswa untuk menanamkan nilai-nilai positif pada siswa (Rinaldi, 2022; Oxtora, 2024; Balamurgan, 2024). Mengacu pada penjelasan tersebut, maka sekolah ataupun lembaga pendidikan sebagai tempat anak mengenyam pendidikan dan sekaligus wadah untuk interaksi anak memiliki peran memberikan contoh ataupun suri tauladan yang baik, sebagai penanaman akhlak agar anak-anak dapat terhindar dari masalah hukum, selain memberikan pengetahuan dalam peningkatan akademik mereka (Muchsin, 2020; Sodikin, 2023). Manajemen konflik berbasis sekolah, disingkat MKBS, adalah satu pendekatan yang perlu dilakukan di sekolah (Octaviyana, 2017; Siregar, 2023).

Untuk mengetahui implementasi keadilan restoratif (*restorative justice*) bagi ABH yang diatur dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dan Permensos No 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi sosial bagi ABH yang dilaksanakan di Yayasan Bengkel Jiwa). Rehabilitasi dan reintegrasi sosial merupakan perwujudan model keadilan restoratif yang dijalankan melalui mekanisme diversifikasi. Diversifikasi mengalihkan anak dari proses formal peradilan demi meminimalisasi pemberian cap buruk anak pasca menjalani proses hukum dan membangun kepercayaan pada masyarakat agar anak dapat diterima kembali sebagai bagian dari Masyarakat (Octaviyana et al, 2017; Roshid, 2022). Contoh penerapan manajemen konflik yang pernah dilakukan oleh Octaviyana et al (2017) dan Muchsin (2019), bahwa kontribusi manajemen resiko konflik sosial dalam kelompok, dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri siswa di sekolah terutama terkait cara dalam berkomunikasi dan berinteraksi.

Langkah strategik untuk membantu dan memberikan dukungan terhadap psikologis dalam kaitannya terhadap bimbingan psikologis terhadap anak berhadapan hukum (ABH) melalui layanan bimbingan dan konseling yang memiliki tujuan umum membantu individu menjadi insan yang berguna dalam kehidupannya yang memiliki berbagai wawasan, pandangan, interpretasi, pilihan, penyesuaian, dan keterampilan serta mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya (Sukatin, 2022; Fatitrahmi, 2023). Bimbingan dan konseling memiliki program yang akan diinternalisasikan dalam manajemen konflik berbasis sekolah kedalam empat komponen layanan meliputi layanan dasar, layanan perencanaan individual, layanan responsif dan dukungan system (Sugiharto, 2014; Ralasari, 2020; Ralasari, 2024). Peran guru bimbingan dan konseling



dalam mengurangi kenakalan siswa adalah dengan memberikan layanan secara klasikal yaitu memberikan layanan informasi kepada seluruh siswa bahwa perilaku kenakalan itu adalah perilaku yang negatif (Siregar, 2023).

Signifikansi penelitian ini terletak pada kebaruan dalam menerapkan komponen BK komprehensif pada komponen manajemen konflik berbasis sekolah yang umum digunakan. Sasaran model yang dihasilkan nantinya tidak hanya menasar pada keterampilan sosial tetapi juga kesadaran sosial emosional ABH, sehingga hal ini juga sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yaitu mewujudkan peserta didik secara aktif untuk memiliki pengendalian diri, dan akhlak mulia (Fatiturahmi, 2023). Program konseling sekolah komprehensif didorong oleh data siswa berdasarkan standar akademik, karier, dan pengembangan sosial/emosional, mempromosikan dan meningkatkan proses belajar bagi semua siswa (Sugiharto, 2014). Kerangka program konseling sekolah komprehensif terdiri dari empat aspek, yaitu landasan (*foundation*), manajemen (*management*), sistem penyampaian (*delivery system*) dan akuntabilitas (*accountability*) (Ralasari, 2024).

Manajemen konflik berbasis sekolah sudah digunakan di Indonesia, contohnya adalah sekolah Budi Mulia di Yogyakarta dan Sekolah Sukma Bangsa di Nanggroe Aceh Darussalam, mencakup metode pembelajaran yang kolaboratif, manajemen kelas yang melibatkan ABH, dan lain-lain. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurnisa Dewanta di dua sekolah yang telah menerapkan MKBS, dalam Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan, menyebutkan bahwa bentuk konflik yang dapat terjadi di sekolah tidak hanya melibatkan antar siswa, tetapi juga antar individu atau kelompok dan bisa berwujud bullying, perkelahian atau tawuran. Sedangkan konflik antar siswa dan guru biasanya dalam bentuk sikap kesopanan, pengabaian pelajaran, dan ancaman fisik. Dalam penerapannya, MKBS dilakukan di sekolah dengan cara sekolah mendatangkan tokoh, menciptakan konflik baru, dan melaksanakan penerapan program-program sekolah untuk membangun komitmen, komunikasi yang terbuka dan keakraban satu sama lain. Sementara untuk menyelesaikan konflik, guru harus membangun komunikasi & keakraban dengan peserta didik, untuk memudahkan penyelesaian konflik (Dewanta, 2014). Rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya 1) Bagaimana identifikasi kebutuhan pengembangan model manajemen konflik berbasis sekolah dalam layanan BK komprehensif untuk Anak Berhadapan Hukum? dan 2) Bagaimana desain produk hipotetik pengembangan model manajemen konflik berbasis sekolah dalam layanan BK komprehensif untuk Anak Berhadapan Hukum?.

METODE

Pendekatan pemecahan masalah dalam penelitian ini melalui tiga tahapan yaitu tahap *look*, *think* dan *act*. Sifat penanganan yang dikembangkan ada dua antara lain pencegahan (*preventive*) dan pemulihan (*rehabilitative*). Yang nantinya dalam hasil penelitian ini akan mampu memperlihatkan model manajemen konflik berbasis sekolah yang dikembangkan berupa program: 1) perencanaan individual layanan bimbingan dan konseling anak berhadapan hukum (ABH), 2) layanan dasar untuk sosialisasi kepada sekolah, masyarakat dan anak, 3) model layanan bimbingan dan konseling dalam komponen layanan responsif dengan manajemen konflik untuk mengembangkan kesadaran sosial ABH, 4) dukungan sistem dengan membangun kelompok dukungan keluarga, dan dukungan sebaya.

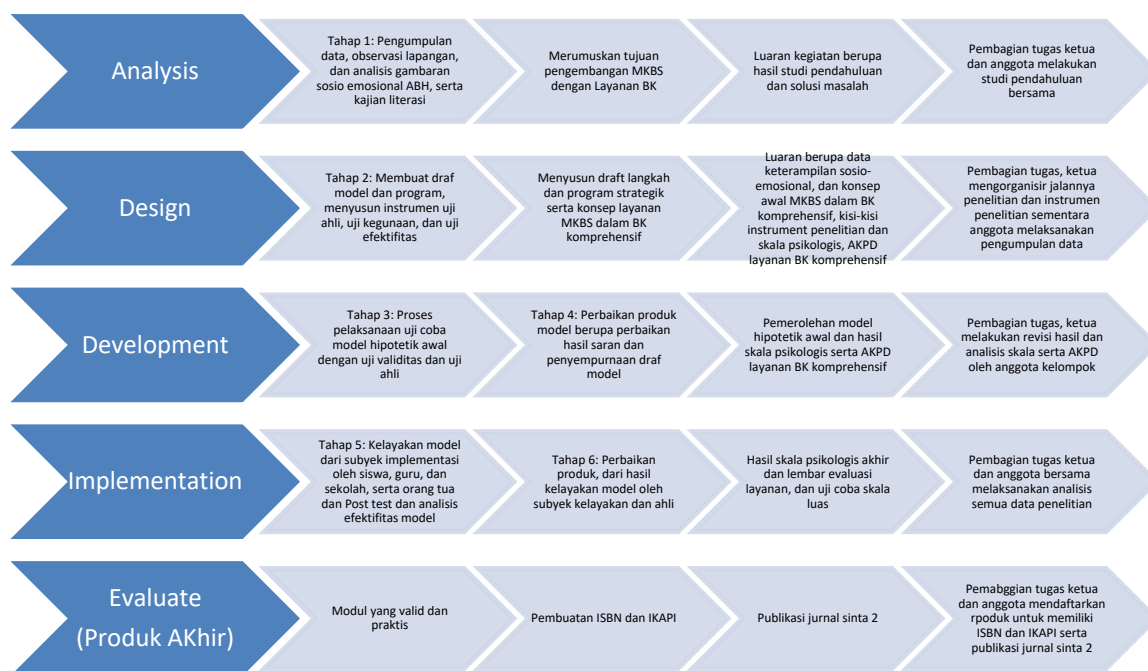
Pendekatan pemecahan masalah dalam penelitian ini mengacu pada beberapa langkah, yaitu: 1) Memahami masalah: peneliti memetakan kebutuhan permasalahan



terkait variabel terikat dan produk yang dikembangkan sebagai variabel pengembangan, 2) Merencanakan penyelesaian: peneliti menyusun tim beserta peran terkait dengan aspek yang akan dikembangkan dan diakomodir dalam kebaruan penelitian yang diusulkan, yaitu melakukan kajian gambaran kultur masyarakat sebagai latar budaya ABH, merencanakan desain pengembangan model panduan manajemen konflik berbasis sekolah dalam layanan BK komprehensif dengan aktifitas komponen BK komprehensif di dalamnya, 3) Penyelesaian : pelaksanaan inti dari pengembangan panduan dan kepraktisan panduan yang dikembangkan, melalui analisis deskriptif kebutuhan lapangan, 4) Pengecekan kembali: melakukan revisi desain model dari hasil catatan pakar dari panduan yang dikembangkan, 5) Finalisasi: penyusunan dan penyelesaian laporan serta luaran penelitian berupa model MKBS dengan BK Komprehensif untuk ABH.

Jenis penelitian ini adalah *Research and Development approach* dengan model *Analysis, Define, Design, Implementation and Evaluation (ADDIE)*. Berdasarkan langkah-langkah pengembangan produk, model penelitian dan pengembangan ini lebih rasional dan lebih lengkap daripada model lainnya. Oleh sebab itu, model ini dapat digunakan untuk berbagai macam bentuk pengembangan produk seperti bahan ajar, media, model, strategi, dan metode layanan yang selaras dengan penelitian ini. Sumber data penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari responden ABH yang ada di Kota Pontianak.

Sampel dan teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dipilih pada penelitian ini karena peneliti menggunakan karakter ABH yang akan diteliti, dan telah dan pernah mendapatkan layanan bimbingan dan konseling di sekolah serta terdata di KPAD Kota Pontianak dan Polresta Kota Pontianak yang berjumlah 547 orang terdiri laki-laki dan perempuan, untuk melihat sejauh mana kebutuhan MKBS dalam BK komprehensif, sekaligus pernah terlibat didalam tindak kekerasan berupa tawuran dengan senjata tajam, dan balap liar.



Gambar 1. Alur Tahapan Penelitian



Tahap *analysis* (A), dilakukan analisis kebutuhan dengan melakukan kegiatan studi pendahuluan dan kajian teoritik yang menghasilkan solusi sesuai kebutuhan, yaitu pengembangan model manajemen konflik berbasis sekolah dalam layanan BK komprehensif untuk mengembangkan keterampilan sosio-emosional ABH. Teknik dan pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik dan instrument dasar yang ditujukan untuk menetapkan tingkat keefektifan, efisiensi, dan daya tarik dari produk yang dihasilkan. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data kualitatif yang diambil melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi, angket kebutuhan berupa kuesioner *Critical Appraisal* dan skala psikologis. Data kualitatif yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif melalui tiga tahapan utama, meliputi: 1) kondensasi data; 2) display data; dan 3) menggambarkan kesimpulan/verifikasi. Analisis SOAR berfokus pada aspek-aspek positif yang dimiliki oleh suatu program atau lembaga Kajian Kritis (*Critical Appraisal*). Jenis data kedua dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif, yang dikumpulkan menggunakan skala kesadaran sosial remaja kemudian dianalisis dengan Analisis Statistik Deskriptif dan Uji validitas dan reliabilitas menggunakan *Wilcoxon* berbantuan SPSS 23.0.

Untuk data kualitatif, prosedur kualitatif dilakukan untuk memaknai deskripsi kondisi faktual tentang pelaksanaan MKBS dalam BK Komprehensif yang dari hasil analisis ini dijadikan dasar untuk menyusun model awal, yang selanjutnya pada tahapan berikutnya dilakukan uji kelayakan model dengan mempertimbangkan masukan dari para pakar dan praktisi, untuk menjadi dasar perbaikan model awal.

Tahap *design* (D), pengumpulan data gambaran ABH yang akan diintegrasikan dalam model manajemen konflik berbasis sekolah dalam layanan BK komprehensif. Pada tahap ini juga dilakukan pembuatan *draft* pengembangan model dan instrumen yang digunakan berupa lembar validasi, angket kepraktisan, skala psikologis kesadaran sosial dan analisis kebutuhan ABH untuk menyesuaikan layanan yang akan diberikan. Skala psikologis akan diuji validitas isi, dan validitas butir soal, dan reliabilitas terlebih dahulu.

Tahap *develop* (D), produk akan divalidasi oleh 5 orang validator yang terdiri atas 2 orang Dosen bimbingan dan konseling dan 1 orang guru BK untuk memvalidasi kebenaran dari substansi materi layanan, 1 orang dosen prodi Sejarah untuk memvalidasi kaitan potensi multikultural pada produk, 1 orang dosen prodi Bahasa Indonesia untuk memvalidasi EYD dan Bahasa yang digunakan. Sedangkan untuk validitas dan reliabilitas instrument melihat data kebutuhan terkait kesadaran sosial, menggunakan teknik *Wilcoxon*, Peneliti melakukan revisi terkait saran dari validator. Setelah dinyatakan valid, model akan diujicobakan secara terbatas yang terdiri dari 35 orang ABH.



Tabel 1.
 Indikator Ketercapaian Penelitian

No	Aspek	Teknik Pengumpulan Data	Indikator	Teknik Analisis Data	Indikator Capaian Target
1.	Kevalidan dan keefektifan	Skala psikologis dan AKPD ABH terkait kebutuhan layanan dan gambaran ABH	1. Kelayakan isi 2. Kebahasaan 3. Sajian model 4. Integrasi MKBS dan BK Komprehensif	1. Analisis data kualitatif dengan metode <i>Critical Appraisal Checklist</i> 2. Analisis kuantitatif dengan uji wilcoxon	1. Sangat valid jika nilai skoring presentase rata skor 86-100 2. Sangat valid jika nilai validitas > 0.8
2.	Kepraktisan	Angket kepraktisan	1. Kemudahan Pengguna 2. Efisiensi Waktu 3. Manfaat	Analisis data kualitatif dengan metode <i>Critical Appraisal Checklist</i>	Sangat praktis digunakan jika skoring rerata skor diantara 85-100
3.	Variabel terikat	Kesadaran Sosial	1. <i>Planning</i> 2. <i>Monitoring</i> 3. <i>Evaluating</i>	Analisis SOAR berfokus pada aspek-aspek positif dalam kesadaran sosial ABH	Memberikan respon sangat baik jika presentase rerata skor 86-100

Tahap implementation (I), diberikan angket kebutuhan dan skala psikologis, dan penerapan model yang dikembangkan kepada ABH pada rentang usia SMP 13-15 tahun di Kota Pontianak yang berjumlah ±100 orang.

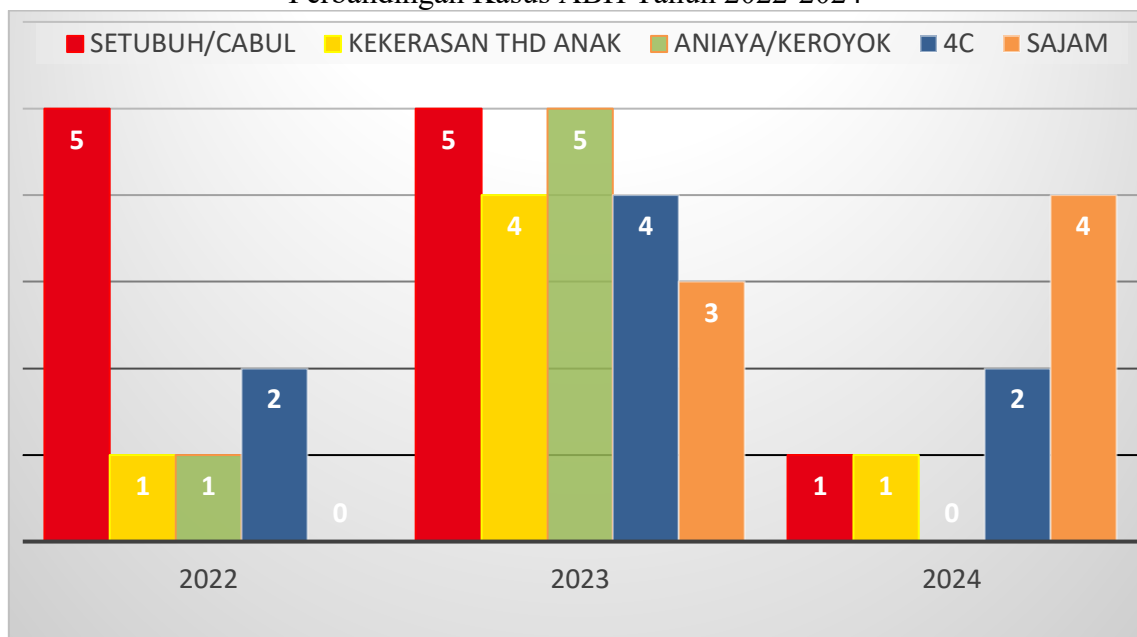
Tahap evaluation (E), Evaluasi dari hasil penerapan yang dilakukan pada tahap implementasi. Produk yang dikembangkan dinyatakan shahih/layak apabila memenuhi dari aspek kevalidan, kepraktisan dan keefektifan serta dapat mengukur variabel terikat yang digunakan. Berikut rincian teknik pengumpulan, indikator dari setiap instrumen yang digunakan, analisis data, dan indikator capaian yang ditargetkan sesuai tujuan penelitian yang digunakan dengan mengacu pendekatan *by step* analisis data *research and development* pada Tabel 1.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model manajemen konflik berbasis sekolah dalam layanan BK komprehensif yang ditemukan fakta di lapangan ABH lebih memiliki kebutuhan akan pengakuan sosial dengan teman sebaya (*peer*). Lebih lanjut di sekolah, utamanya oleh guru BK, bagi ABH yang masih berstatus pelajar, dalam proses identifikasinya lebih merasa enggan untuk melakukan konseling dengan guru BK, sehingga ketika terjerat masalah kenakalan remaja yang berkaitan dengan hukum, banyak guru BK tidak mengetahui penyebabnya. Sementara itu untuk pelaksanaan MKBS yang ada di Yogyakarta umumnya, menekankan pada elemen kebijakan sekolah yang terpadu dengan sekolah dan masyarakat, namun belum menyentuh seutuhnya terkait peran guru Bk terutama dalam pelaksanaan layanan BK Komprehensif sesuai dengan jurnal penelitian dari Siti Nurnisa Dewanta (Dewanta, 2014). Sedangkan, dalam prospek MKBS yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah MKBS yang berfokus pada pelaksanaan MKBS yang dimodifikasi dalam layanan komponen BK komprehensif dimana pelaksanaannya meliputi 4 bidang komponen utama yaitu layanan dasar, layanan repsonsif, layanan perencanaan individual, dann layanan dukungan sistem. Dalam hasil penelitian lainnya hanya baru disebutkan terkait studi literasi pentingnya manajemen konflik di sekolah, namun belum ada hasil terkait model penerapan berbasis sekolah utamanya dalam komponen BK komprehensif (Fatiturahmi, 2023). Selanjutnya, dilihat dari tren kenakalan remaja di Kota Pontianak dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik 1.
Perbandingan Kasus ABH Tahun 2022-2024



Dari penjabaran grafik 1 diatas mensiratkan bahwasanya kesadaran sosial remaja masih minim sehingga perlu untuk diakomodir upaya peningkatannya melalui berbagai layaan yang ada dalam BK Komprehensif. Dari data diatas juga, ditemukan bahwa pelajar ABH yang ditarik datanya melalui kuesioner kebutuhan berjumlah 547 orang, memiliki kriteria adalah ABH dengan rentang usia 13-15 tahun berjenis kelamin perempuan maupun laki-laki, yang melalui hasil wawancara dan observasi permasalahan yang muncul di sekolah, ABH yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah ABH yang



pernah terlibat dalam tawuran ataupun perkelahian antar pelajar dan kelompok remaja lainnya yang menggunakan senjata tajam maupun tanpa senjata tajam. Dengan hasil yang terlihat dalam Tabel 3.1 berikut ini merupakan identifikasi kebutuhan pengembangan model manajemen konflik berbasis sekolah dalam layanan BK komprehensif untuk Anak Berhadapan Hukum di lapangan.

Tabel 2.

Tabel Analisis Deskriptif Kebutuhan Lapangan

Pertanyaan	Jawaban	N (547)	(%)
		ABH	Presentase
Guru dan siswa memiliki keterampilan komunikasi dan kemampuan mendengarkan yang efektif beserta umpan balik yang responsif	Ya	291	53.20
	Tidak	256	46.80
		547	100
Guru dan siswa serta antar siswa saling mengajarkan keberagaman dan perbedaan serta interaksi positif	Ya	308	56.30
	Tidak	239	43.70
		547	100
Selama bergaul di sekolah, siswa diberikan kesempatan untuk menemukan solusi masalah dan bertanggung jawab terhadap perbuatan dan perilaku	Ya	315	57.58
	Tidak	232	42.42
		547	100
Terdapat ruang diskusi terbuka untuk sama-sama menyelesaikan masalah secara konstruktif	Ya	229	76.23
	Tidak	318	23.77
		547	100
Terdapat wadah untuk membangun keterampilan social dan menambah wawasan pengetahuan yang berbasis IT dan nilai-nilai budaya	Ya	417	69.28
	Tidak	130	30.72
		547	100

Selanjutnya dalam penelitian ini menggali kondisi kesadaran sosial ABH di Kota Pontianak. Dalam pelaksanaan analisis data ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kesadaran sosial ABH di SMP Kota Pontianak, sebagaimana data kenakalan remaja yang meningkat dalam 4 tahun terakhir di Kota Pontianak, semenjak covid terjadi. Responden yang memperoleh kuesioner kesadaran sosial terdiri dari 919 orang ABH baik yang masih



berstatus sebagai pelajar maupun yang telah putus sekolah. Sebelum analisis deskriptif tingkat kesadaran sosial berikut ini adalah analisis deskriptif responden sebagaimana dapat terlihat dalam tabel 3.2 di bawah ini:

Tabel 3.
 Analisis Deskriptif Responden

Jenjang Kelas	N (919)	%	Jenis Kelamin	N (919)	%	Usia	N (919)	%
7 (Tujuh)	300	32.66	L	537	58.44	12-14	619	67.36
8 (Delapan)	210	22.85	P	382	41.56	15-16	300	32.64
9 (Sembilan)	209	22.74						
Putus Sekolah	200	21.75						
Jumlah	919	100		919			919	100

Berdasarkan tabel 3 diatas dijelaskan bahwa responden berjumlah 919 orang yang berasal dari siswa kelas 7 sejumlah 300 (32.6%), kelas 8 sejumlah 210 (22.85%), kelas 9 sejumlah 209 (22.74%), serta putus sekolah sejumlah 200 (21.75%). Jenis kelamin responden penelitian didominasi oleh laki-laki sebesar 58.44%, dan usia responden 67.36% di rentang usia 12-14 tahun.

Selanjutnya, pada tabel 3.3 menjelaskan bahwa tingkat kesadaran sosial pada kategori rendah yakni dengan besara 31.55%, lebih besar dari itu kategori sedang di angka 45.27%, dan tertinggi di 23.18%. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya upaya yang dilakukan oleh sekolah dan guru BK utamanya untuk meningkatkan kesadaran sosial, sehingga dengan demikian dapat mengurangi perilaku kenakalan, serta upaya sekolah dalam menciptakan sekolah yang aman dan nyaman bagi civitas sekolah dibutuhkan penguatan sekolah berbasis program yang jelas dan saling mendukung satu sama lain (Kemendikdasmen, 2025). Selain itu, dari data tersebut menunjukkan bahwa keterampilan komunikasi siswa dan keterampilan siswa secara pribadi berkaitan juga dengan keterampilan hidup sebagai elemen-elemen penting pencegahan konflik yang dapat melatih dan membina siswa secara langsung masih perlu banyak diperhatikan dan didukung keberhasilan pelaksanaan program yang mengarah pada manajemen konflik yang efektif di sekolah yang bisa terintegrasi dengan baik dalam layanan BK komprehensif di sekolah meliputi layanan dasar, layanan responsive, layanan perencanaan individual dan dukungan system (Rizal, 2008; Muchsin H. , 2020; Sukatin, 2022).

Desain produk

Implikasi praktis dalam desain produk MKBS dalam BK komprehensif yang dirancang dalam penelitian ini menunjukkan bahwa siswa yang terlibat dalam tawuran pelajar ataupun dalam scope lainnya yang berpotensi memicu konflik dan keresahan di lingkungan sekolah maupun masyarakat memiliki kesadaran sosial yang masih minim, implikasi praktisnya adalah maka sekolah dan orang tua harus mampu melakukan kolaborasi yang mampu mendorong siswa untuk mengikuti program layanan BK komprehensif, yang terpadu dalam satu manajemen konflik berbasis sekolah. Melihat dari hasil analisis kebutuhan lapangan terkait dengan kebutuhan MKBS dan tingkat kesadaran sosial yang masih berada pada kategori sedang maka penelitian ini kemudian ada untuk merancang produk awal MKBS dengan BK Komprehensif untuk meningkatkan kesadaran sosial siswa utamanya ABH di Kota Pontianak. Produk dalam bentuk panduan yang dikembangkan terdiri dari 4 komponen utama yaitu Layanan dasar, layanan



responsive, layanan perencanaan individual, dan dukungan sistem. Desain produk yang direncanakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4.
 Desain Internalisasi MKBS dalam BK Komprehensif

Elemen MKBS	Elemen BK Komprehensif	Model Awal
Keterampilan Komunikasi	Layanan Dasar	Sekolah, Keluarga, dan Siswa memiliki keterampilan komunikasi yang efektif dan mendengarkan aktif disertai umpan balik yang responsive dalam menyikapi keluhan dan pelaksanaan konseling secara intensif oleh guru BK dan berkelanjutan di lingkungan keluarga
Keterampilan Sosial	Layanan Dasar dan Layanan Responsif	Mengajarkan keberagaman dan perbedaan serta interaksi positif antar warga sekolah, dan upaya menciptakan lingkungan yang ramah anak dan nyaman serta aman bagi seluruh warga sekolah
Keterampilan Hidup	Layanan Responsif dan Perencanaan Individual	Kemampuan problem solving dan melatih perilaku bertanggung jawab kepada siswa dan sesama warga sekolah, dalam mentaati aturan norma yang berlaku di lingkungan sekolah.
Kebijakan Sekolah	Dukungan sistem	Dialog terbuka dan penyelesaian konflik secara konstruktif dan terjadwal dengan sekolah, siswa, dan orang tua serta badan komite sekolah
Pelatihan dan Pembinaan	Dukungan sistem	Pengembangan wawasan pengetahuan dan keterampilan siswa untuk menunjang kehidupan setelah masa sekolah, berupa soft skill yang dibutuhkan dalam lapangan kerja dan masyarakat
Sarana Pendukung	Dukungan sistem	Forum diskusi yang komunikatif dan partisipatif disertai proses mediasi yang baik dalam penyelesaian dan pengambilan keputusan, disertai sarana IT yang mendukung.

Pengembangan Produk

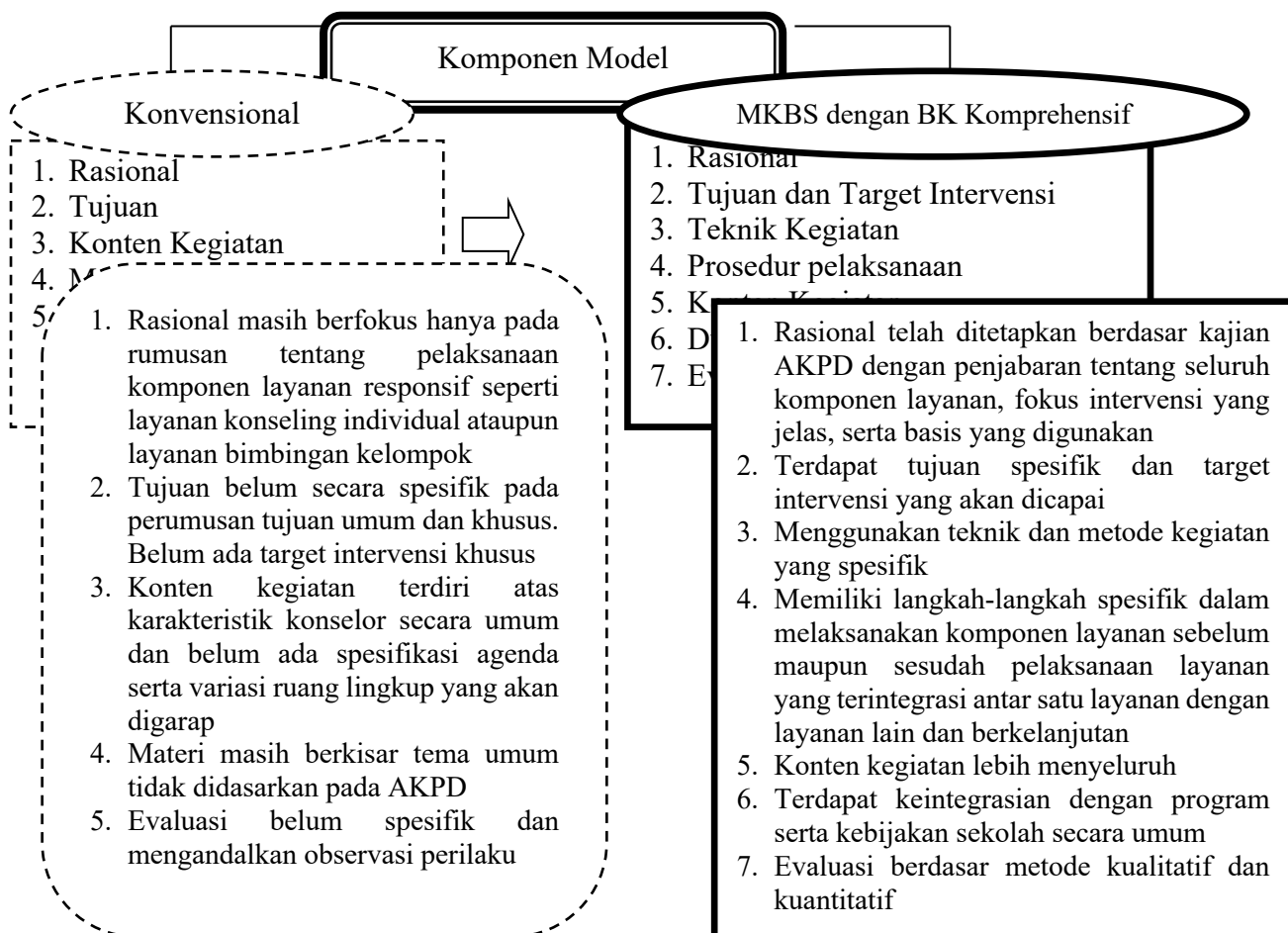
Dalam penelitian ini, MKBS yang dikembangkan dalam layanan BK komprehensif masih dalam tahap desain model, yaitu dari pengembangan model factual menjadi model hipotetik, yang belum sampai pada uji kelayakan namun baru sampai uji keahlian. Proses pengembangan produk dilakukan melalui uji ahli, uji ahli dalam penelitian ini adalah Dr. Uray Herlina, M.Pd, yang merupakan dosen tetap Bimbingan dan Konseling di Universitas PGRI Pontianak dan Dr. Halida Azzahra, M.Pd, Dosen Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Tanjung Pura Pontianak serta dua



praktisi guru Bimbingan dan Konseling yaitu Arni Aswad, S.Pd dan Fitriani, S.Pd, untuk menilai kelayakan model dari aspek kelimuan Bimbingan dan Konseling, selanjutnya terdapat pula dosen Program Studi Bahasa Indonesia, Dr. Try Hariadi sebagai dosen ahli untuk menilai kelayakan dari segi Bahasa Indonesia, dan Dosen Sejarah, Dr. Basuki Wibowo, untuk menilai kekhasan budaya dan sejarah konflik menyesuaikan kultur di Kota Pontianak. MKBS yang dikembangkan berisi 7 komponen utama yakni:

1. Rasional yang menjelaskan secara rinci tentang *reasoning* dari peneliti dalam mengembangkan MKBS.
2. Tujuan dan target intervensi yaitu tujuan yang ingin dicapai dari pengembangan model. Tujuan ini dibagi menjadi 2, yakni tujuan umum dan tujuan khusus yang keduanya terfokus pada komponen BK komprehensif.
3. Prosedur kerja yang berisi langkah pelaksanaan dan penyusunan program MKBS dalam BK komprehensif.
4. Teknik dan metode layanan dalam komponen BK komprehensif
5. Konten dalam komponen layanan termasuk didalamnya unsur-unsur serta tahapan yang akan dilaksanakan dan tema materi yang digunakan.
6. Dukungan sistem dalam menyukkseskan kegiatan komponen layanan.
7. Evaluasi dan tindak lanjut

Adapun gambaran desain model faktual MKBS dalam BK komprehensif dalam desain pengembangan dapat dilihat pada gambar 3.1, sebagai berikut:



Gambar 1. Model Faktual MKBS dalam BK Komprehensif



Pembahasan

Dari hasil penelitian itu maka dapat ditarik pembahasan bahwasanya, sekolah ialah lembaga ataupun tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, seperti menulis, membaca dan berperilaku dengan baik. Sekolah itu merupakan bagian masyarakat yang berdekatan dengan kondisi nyata dalam masyarakat pada masa sekarang. Namun terdapat, beberapa siswa yang dididik dalam sistem peradilan anak menghadapi tantangan akut seperti kurangnya motivasi dan sikap negatif terhadap sekolah (Bobbio, 2020; O'Connor, 2021). Sekolah-sekolah dalam sistem tersebut diharapkan memberikan pengajaran yang ketat dan selaras dengan pendidikan yang tetap humanis dengan penekanan terhadap pelajaran yang menumbuhkan kebaikan dan empati terhadap manusia, hewan, dan lingkungan, serta telah terbukti memotivasi siswa dan mendorong sentimen pro-sosial mereka, yang dalam hal ini berkaitan dengan kesadaran sosial siswa, dalam konsep manajemen konflik berbasis sekolah dalam layanan BK komprehensif (Bobbio, 2020; O'Connor, 2021).

Tidak hanya itu, sekolah adalah tempat kedua bagi anak untuk mereka berlatih dan tumbuh, sedangkan untuk mewujudkan itu semua maka sekolah adalah investasi awal bagi siswa mempelajari keterampilan sosial dan melatih kesadaran sosial yang baik bagi iklim belajar siswa (Sugiharto, 2014; Dewanta, 2014; Pardosi, 2024). Kepatuhan terhadap peraturan secara sadar merupakan modal utama untuk menghasilkan suatu sikap yang positif dan produktif, positif artinya sadar akan tujuan yang akan dicapai, sedangkan produktif mengandung arti selalu melakukan kegiatan yang bermanfaat. Seperti peserta didik yang terbiasa belajar teratur baik di sekolah maupun di rumah maka otaknya akan terlatih setiap hari. Dengan adanya kepatuhan terhadap tata tertib sekolah maka peserta didik belajar menghormati dan menaati aturan-aturan umum lainnya, belajar mengembangkan kebiasaan tidak mengenggang dan mengendalikan diri (Rizal, 2008; Roshid, 2022).

Upaya menciptakan kepatuhan peserta didik terhadap peraturan yang berlaku di sekolah bertujuan untuk mengurangi perilaku menyimpang yang dapat berdampak negatif pada peserta didik. Hal ini juga berfungsi sebagai alat kontrol atau rekayasa sosial terhadap mereka. Seperti yang kita tahu, saat ini banyak siswa sekolah yang terlibat dalam perilaku kenakalan remaja, pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, tawuran antar sekolah, dan perilaku tidak etis dalam kehidupan sehari-hari (Rizal, 2008; Fatiturahmi, 2023; Siregar, 2023). Model manajemen konflik berbasis sekolah menjadi panduan yang tepat sebagai upaya yang menjembatani antara kebutuhan siswa dan sekolah serta masyarakat. Manajemen konflik sedikitnya memiliki tiga tahapan sebagai berikut yang ketiga tahapan itu sejalan dengan komponen yang ada dalam layanan BK komprehensif (Sugiharto, 2014; Ralasari, 2020; Siregar, 2023). Pertama, perencanaan analisis konflik. Tahap ini merupakan tahap identifikasi masalah yang terjadi, untuk menentukan sumber penyebab dan pihak-pihak yang terlibat. Konflik yang sudah dalam tahap potensi memerlukan stimulus agar menjadi terbuka dan dapat dikenali. Kedua, penilaian konflik. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui kondisi konflik dan pemecahannya.

Apakah masih pada titik kritis yang dapat menimbulkan dampak positif, atau baru dalam tersembunyi, sehingga perlu diberi stimulus agar mendekati titik kritis dan memberikan dampak positif. Ketiga, pemecahan konflik. Tahap ini merupakan tindakan untuk memecahkan konflik, termasuk memberi stimulus jika masih dalam tahap tersembunyi dan perlu dibuka. Program dalam manajemen konflik berbasis sekolah tidak hanya sekedar mengajar melainkan juga memberikan pesan perdamaian, sebab dalam



program manajemen konflik berbasis sekolah didalamnya meliputi manajemen konflik terapeutik, serta intervensi krisis dalam ruang kehidupan dalam hal ini adalah relasi sosial siswa (Broekaert, 2003). Manajemen konflik termasuk pada suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi (termasuk tingkah laku) dari pelaku maupun pihak luar dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan dan interpretasi. Bagi pihak luar (di luar yang berkonflik) sebagai pihak ketiga, yang diperlukan adalah informasi yang akurat tentang situasi konflik. Hal ini karena komunikasi efektif di antara pelaku dapat terjadi jika ada kepercayaan terhadap pihak ketiga (Siahaan, 2006; Murni, 2018; Ardiani, 2020).

Maka dari keseluruhan hasil penelitian ini dapat ditarik bahasan bahwasanya, kenakalan remaja merupakan masalah multifaset dengan akar penyebab sosial yang mendalam. Memahami faktor-faktor ini penting untuk mengembangkan intervensi efektif yang mengatasi akar penyebab kenakalan dan mendorong perkembangan positif remaja. Pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan faktor keluarga, teman sebaya, masyarakat, dan sosial ekonomi diperlukan untuk mencegah dan mengurangi kenakalan remaja (Arbach, 2021; Balamurgan, 2024; Kemendikdasmen, 2025).

Kesimpulan

Kesimpulan MKBS dalam BK komprehensif layak di implementasikan dengan catatan memiliki 1) memiliki panduan yang terdiri dari 7 komponen, yakni: a) rasional; b) tujuan dan target intervensi; c) prosedur kerja; d) prosedur pelaksanaan; e) konten kegiatan; f) dukungan sistem; dan g) evaluasi dan tindak lanjut. 2) Hasil uji kelayakan ahli menunjukkan bahwa model yang dirancang layak untuk diimplementasikan di lapangan, meskipun belum teruji dalam efektifitas, maka perlu akan dilakukan uji efektifitas jangka panjang dengan melibatkan beberapa pihak sebagai komponen dukungan sistem dalam layanan BK komprehensif dengan persiapan estimasi waktu maksimal 1 bulan dari hasil uji kelayakan ini disusun dan dihasilkan. Penggunaan model ini juga belum digeneralisasikan secara luas karena hanya sampai pada uji coba kepakaran, belum sampai pada uji coba luas dan desiminasi pada kawasan yang lebih luas dalam beragam karakteristik di berbagai sekolah. 3) Beberapa perlakuan yang terdapat pada model ini membutuhkan sarana dan prasarana yang tidak semua sekolah memilikinya serta pertimbangan nilai-nilai dan kebijakan sekolah dalam komitmen implementasi MKBS dalam BK komprehensif yang diberikan perlu mempertimbangkan sudut pandang lain dalam latar belakang di tiap sekolah kemungkinan berbeda. 4) Agar dapat terimplementasikan dengan baik MKBS dalam BK Komprehensif maka perlu dilakukan peta kondisi dalam proses seleksi penerimaan siswa baru setiap akan dimulainya tahun ajaran baru melalui asesment perilaku yang dilakukan oleh guru BK dan memperoleh persetujuan orang tua siswa dan juga pihak internal sekolah asal siswa lulusan dan yang menerima siswa tersebut. 5) Perlu dibentuk tim kecil yang kolaboratif yang terdiri dari pihak Dinas Pendidikan, KPAD, maupun Kepolisian dalam menyusun panduan teknis pencegahan kenakalan remaja yang menyebabkan konflik dan ketidaknyamanan dalam lingkungan masyarakat dan sekolah. 6) Monitoring dan evaluasi pengembangan MKBS dilaksanakan bersama-sama dengan tim kecil kolaboratif yang telah dibentuk untuk meninjau sejauh mana hasil MKBS yang akan diuji efektifitasnya dilaksanakan telah berhasil dilakukan guna perbaikan mutu MKBS BK komprehensif yang berkelanjutan.



REFERENSI

- Arbach, K. (2021). El Modelo del Triple Riesgo Delictivo en la explicación de la conducta antisocial de adolescentes varones y mujeres. *Articulos*.DOI: <https://doi.org/10.46381/reic.v19i1.479>
- Ardiani. (2020). Organisasi Perilaku dan Struktur serta Proses. Jakarta: Dina Putra Aksara.
- Balamurgan, A. (2024). Impact of social factors responsible for Juvenile delinquency – A literature review. *Journal Of Education and Health Promotion*.373-385.DOI: DOI: 10.4103/jehp.jehp_786_23
- Bobbio, A. (2020). Juvenile delinquency risk factors: Individual, social, opportunity or all of these together? *International Journal Of Law, Crime and Justice*.480-492. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcrj.2020.100388>
- Dikdasmen. (2025, April Sabtu). Kemendikdasmen. Retrieved from Enam Program Prioritas Kemendikdasmen: <https://gtk.dikdasmen.go.id/read-news/enam-program-prioritas-kemendikdasmen>
- Fatiturahmi. (2023). Studi Literatur Peran Manajemen Konflik dan Cara Penanganan Konflik dalam Organisasi Sekolah. *Journal Of Education Research*, 1047-1081.DOI <https://doi.org/10.37985/jer.v4i3.277>
- Harsono, E. (2024, Agustus 28). 15.120 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Terjadi Tahun 2023, Laporkan Aksi Kekerasan di Layanan WhatsApp SAPA 129. Retrieved from PAUDPEDIA: <https://paudpedia.kemdikbud.go.id/berita/15120-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-terjadi-tahun-2023-laporkan-aksi-kekerasan-di-layanan-whatsapp-sapa-129?do=MjExNS00MGU3ZTU0OA==&ix=MTetYmJkNjQ3YzA=>
- Kartika, M. (2025). Stigmatisasi Pada Anak Nakal dan Bermasalah dengan Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 41-48. DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3856>
- Kemendikdasmen. (2025, April Selasa). GTK Kemendikdasmen. Retrieved from Kemendikdasmen Selenggarakan Kegiatan Bimbingan Teknis Guru BK dalam Rangka Menciptakan Sekolah yang Aman, Nyaman, dan Gembira: <https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=kemendikdasmen+selenenggarakan+bimbingan+teknis&ie=UTF-8&oe=UTF-8>
- KPAD, P. (2024, Juni Selasa). KPAD Kota Pontianak. Retrieved from KENAKALAN REMAJA MASUK KASUS PERLINDUNGAN KHUSUS: <https://kpad.pontianak.go.id/berita/kenakalan-remaja-masuk-kasus-perlindungan-khusus>
- KPAI, H. (2025, Maret 14). KPAI. Retrieved from KPAI Dorong Implementasi Restitusi Anak Berhadapan Hukum: <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-dan-sksg-ui-dorong-implementasi-hak-restitusi-bagi-anak-korban-pidana>
- Muchsin, H. (2020). MODEL PENGEMBANGAN MANAJEMEN KONFLIK BERBASIS SEKOLAH. Seminar Nasional II USM (pp. 178-185). Nagroe Aceh Darussalam: USM.
- Muchsin. (2019). The Development of A School-Based Conflict Management Model in Aceh Besar Junior High School. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 495-510. DOI: <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v7i2.191>
- Murni. (2018). Manajemen Konflik dalam Pendidikan. *Jurna Ar-Raniry*, 132-140. DOI: <https://doi.org/10.22373/ji.v4i1.3948>



- O'Connor, J. (2021). Humane Education's Effect on Middle School Student Motivation and Standards-Based Reading Assessment. *Journal Sciences MDPI*.357-369.DOI: <https://doi.org/10.3390/socsci10100376>
- Octaviyana, I. (2017). The Contribution of Social Conflict with Peers toward Self-Confidence. *International Journal of Research in Counselling*, 10-15. DOI: <https://doi.org/10.29210/20181112>
- Oxtora, R. (2024, Maret Minggu). Kalbar Antara. Retrieved from Disdikbud Kalbar surati seluruh kepala sekolah antisipasi kenakalan remaja: <https://kalbar.antaraneews.com/berita/571560/disdikbud-kalbar-surati-seluruh-kepala-sekolah-antisipasi-kenakalan-remaja>
- Pardosi, Y. M. (2024). Analisis Kesadaran Hukum bagi Peserta Didik terhadap Pelanggaran Disiplin di SMA Negeri 1 Bilah Hulu. *Al Qalam*, 55-67. DOI : 10.35931/aq.v18i2.3406
- Pontianak Daily. (2025, Januari 26). Salah satu Bang jago Tawuran, diamankan Warga. Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia.
- Ralasari, M. (2020). *Bimbingan dan Konseling: Profesi dalam Layanan Integratif*. Pontianak: Pustaka Rumah Aloy.
- Ralasari, M. (2024). *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Langsung Terbit.
- Rinaldi, K. (2022). Penerapan Sanksi Terhadap Siswa/Siswi yang Melakukan Pelanggaran di Luar Sekolah. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 84-94. <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v3i1.812>
- Roshid, M. A. (2022). Implementasi Restorative Justice Melalui Upaya Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum. *Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember*, 185-197. DOI: <https://doi.org/10.33366/rfr.v12i2.4061>
- Sigalingging, R, A. (2025, Maret 25). Pengadilan Negeri Purwakarta. Retrieved from Peran Orang Tua Asuh dalam Rehabilitasi Sosial untuk Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam Memberikan Dukungan Emosial: [https://pn-purwakarta.go.id/peran-orang-tua-asuh-dalam-rehabilitasi-sosial-untuk-anak-berhadapan-dengan-hukum-\(abh\)-dalam-memberikan-dukungan-emosial.html#:~:text=Anak%20Berhadapan%20dengan%20Hukum%20\(ABH\)%20merupakan%20anak%20yang%20berkonflik%20dengan,t](https://pn-purwakarta.go.id/peran-orang-tua-asuh-dalam-rehabilitasi-sosial-untuk-anak-berhadapan-dengan-hukum-(abh)-dalam-memberikan-dukungan-emosial.html#:~:text=Anak%20Berhadapan%20dengan%20Hukum%20(ABH)%20merupakan%20anak%20yang%20berkonflik%20dengan,t)
- Siregar, W. F. (2023). STRATEGI GURU BIMBINGAN KONSELING DALAM MENGURANGI KENAKALANSISWAMELALUIKONSELING INDIVIDU DI MADRASAH ALIYAH SWASTA PAB 1 SAMPALI . *Garuda Kemdikbud*, 104-115. DOI: <http://dx.doi.org/10.30829/mrs.v2i1.693>
- Sodiqin, A. (2023, Maret 12). Anak Berhadapan Hukum, Bagaimana Penerapan di Sekolah. (S. Bahri, Interviewer)
- Sugiharto, D, Y, P. (2014). Model Program Bimbingan dan Konseling Komprehensif. *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 123-129. DOI 10.15294/JUBK.V3I2.4617
- Sukatin, A. D. (2022). BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM PENDIDIKAN. *Jurnal Ar Raniry*, 3. DOI: <https://doi.org/10.22373/bunayya.v8i2.14480>
- Usmita, F. (2023). Peningkatan Kepatuhan Pelajar Terhadap Tata Tertib di Sekolah. *Hawa: Jurnal Pemberdayaan dan Pengabdian pada Masyarakat*, 55-61. DOI: <https://doi.org/10.69745/hawajppm.v1i2.29>

